



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 30, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Yusuf Bauti Kompleks Griya Pesona Indah Blok A. Nomor 2, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Adeh Dwi Putra M., S.H., M.H. dkk., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Legalitas Law Firm, beralamat di Jalan Sungai Saddang Lama (Ruko Nomor 29 A Lt. 3) Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 84/SK/IV/2019/PA Sgm., tanggal 26 April 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., umur 37, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (general manager), tempat kediaman di Burza Hotel Yokyakarta Jalan Jogokaryan Nomor 61-63, Mantrijon, Kota Jokjakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



bawah Register Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm. Tanggal 26 April 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 124/28/IV/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jl. Yusuf Bauti Kompleks Griya Pesona Indah Blok A No 2, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Azalea Sabrina Qaireen, Perempuan, Lahir di Makassar Pada Hari Rabu Tanggal 29 Oktober 2014.
5. Bahwa kebahagiaan sebagai suami dan istri yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hingga tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat jarang kembali ke rumah dan sejak Januari 2019 sampai dengan saat ini Tergugat tidak kembali ke rumah.

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak Januari 2019 hingga saat gugatan ini diajukan.
- Bahwa Penggugat tidak merasakan lagi kehidupan layaknya suami dan istri bersama Tergugat.
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling mempercayai dan berkomunikasi dengan baik sehingga seringkali terjadi pertengkaran secara terus menerus.

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat seringkali melakukan tuduhan yang tidak berdasar kepada Penggugat kemudian Tergugat yang bekerjanya di luar kota hanya memfokuskan diri untuk mengurus pekerjaannya. Yang pada intinya setiap kali bertemu dengan Penggugat tidak lagi saling mempercayai dan berkomunikasi dengan baik sehingga terjadi pertengkaran.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat pernah musyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah tidak dapat lagi dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan Salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Tergugat dan Penggugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.

12. Bahwa Penggugat sanggup bayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, **Abd. Rahman bin Sakure** terhadap Penggugat, **Fitria Adriani binti Abdul Azis**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Tergugat dan Penggugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Azalea Sabrina Qaireen**, Perempuan, Lahir di Makassar Pada Hari Rabu Tanggal 29 Oktober 2014;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Subsider: mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm. Tanggal 13 Juni 2019 dan Tanggal 3 Juli 2019.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat di bawah Register Perkara Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm. Tanggal 26 April 2019 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/28/IV/2011, Tanggal 24 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LU-29012015-0041, tanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

- 1. Amelia Prawita yani, S.H. binti Ismail Manaf**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Keamanan Nomor 16, Kelurahan Macini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1996.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Kabupaten Luwu, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Makassar. Terakhir keduanya tinggal di rumah keluarga Penggugat di Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017 mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun lamanya sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya. Keduanya juga tidak pernah menjalin komunikasi satu dengan lainnya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

2. Santi Indraswari binti Arif, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maccina Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Kabupaten Luwu, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Makassar. Terakhir keduanya tinggal di rumah keluarga Penggugat di Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017 mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun lamanya sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya. Keduanya juga tidak pernah menjalin komunikasi satu dengan lainnya.

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/4/12/96, Tanggal 21 Desember 1996 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama Amelia Prawita yani, S.H. binti Ismail Manaf dan saksi kedua Penggugat yang bernama Erikasmira binti Pattabuki dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 1996 di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya pernikahan keduanya hidup harmonis alan tetapi sejak Januari 2017 muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
- c. Akhirnya, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun lamanya atau sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan kelakuan Tergugat.
- d. Sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya. Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sulit atau tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga tahun atau sejak Januari 2017 sampai sekarang. Penggugat

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



dan Tergugat tidak pernah lagi berusaha kembali rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi untuk mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, ketidak-pedulian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ايغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak".

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka dan oleh karena perceraian ini merupakan perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Abd. Rahman bin Sakure terhadap Penggugat, Fitria Adriani binti Abdul Azis.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut hanya untuk memberikan kepastian identitas hukum para pihak, maka diwajibkan kepada panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan laporan tentang adanya perceraian tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Abd. Rahman bin Sakure) terhadap Penggugat (Fitria Adriani binti Abdul Azis).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2019 M** yang bertepatan dengan tanggal **28 Jumadilakhir 1440 H.** oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahrul Fahmi, M.H. dan Dra. Haniah, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Dra. Sahrul Fahmi, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 391.000,00

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 475/Pdt.G/2019/PA Sgm.